

ABSTRAK

Alhilal Hamdi,Abdi,Nurbiah Tahir,Kebijakan Electronic Government Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

kebijakan publik adalah suatu proses atau rangkaian mode kegiatan atau pengambilan keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik yang actual dan fiktif. *E-Government* adalah bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menjadi media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan elektronik Government dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public di dinas kependudukan dan dan catatan sipil Kabupaten Enrekang. penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan Trigulasi Sumber, Metode dan Waktu. Pemilihan informan berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, dan informan tersebut mengetahui masalah yang penulis teliti

Hasil menunjukkan bahwa kebijakan electronic government dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Enrekang yang dilihat dari aspek: 1) Komunikasi, kebijakan electronic government dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan kebijakan yang ada dimana komunikasi yang dilakukan itu sangat penting sebagai sifat transparansi kepada masyarakat. 2) sumber daya, kebijakan electronic government dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Enrekang sudah baik dengan adanya pengembangan dan pelatihan yang diberikan sehingga meningkatkan kinerjanya. 3) Disposisi, kebijakan electronic government dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten sudah cukup baik dari segi sikap dan tanggung jawabnya. 4) struktur Birokrasi, kebijakan electronic government dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten sudah cukup baik dalam sumber informasi bagi pimpinan atau eksekutif dalam menghasilkan berbagai kebijakan.

Kata Kunci :Kebijakan Publik, *E-Government*